

PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN UNTUK KEMANDIRIAN DAERAH PERBATASAN

Ipung Prastowo, Sabrina Permata Dewi, Tiara Kartika Putri, Muhamad Dinan Fauzi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau

Abstract

Entikong is a subdistrict located in Sanggau Regency, West Kalimantan with an area of 506.89 km² or about 3.64% of the total area of Sanggau Regency. Entikong is directly adjacent to Tebedu, Sarawak, Malaysia. With the Covid-19 pandemic, *border* closures were carried out at the Entikong Cross-Border Post (PLBN). This impacted the economic wheels of the community and made Entikong like a dead city. Therefore, a correlation analysis is carried out to see the interrelationships between the variables used. The results of the analysis showed the correlation between the number of MSMEs and the number of exports was 0.691839. The correlation between the amount of smuggling and the number of exports amounted to 0.830151. The correlation between the number of MSMEs and the number of smugglers is 0.171758. Lastly, the correlation between the number of MSMEs and economic growth amounted to 0.935048. To develop *border* areas need a flexible *border* cap open system, if it is not possible the solution is to focus on MSMEs that have the greatest correlation with economic growth by providing assistance on KUR programs, UMi programs, and product diversification. In addition, to optimize the value of exports can be done payment and financing strategies through the transfer of market share so that even in Entikong the value of exports worth 0 can be transferred through other channels. With this analysis is expected to reflect the economic picture in Entikong and serve as one of the references in decision making despite some data limitations.

Abstrak

Entikong merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan luas daerah 506,89 km² atau sekitar 3,64% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sanggau. Entikong berbatasan langsung dengan Tebedu, Serawak, Malaysia. Dengan adanya pandemi Covid-19, dilakukan penutupan *border* pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Hal tersebut berdampak pada roda perekonomian masyarakat dan menjadikan Entikong seperti kota mati. Oleh karena itu, dilakukan analisis korelasi untuk melihat keterkaitan antara variabel yang digunakan. Hasil analisis menunjukkan korelasi antara jumlah UMKM dan jumlah ekspor adalah 0,691839. Korelasi antara jumlah penyelundupan dan jumlah ekspor sebesar 0,830151. Korelasi antara jumlah UMKM dan jumlah penyelundupan adalah sebesar 0,171758. Terakhir, korelasi antara jumlah UMKM dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,935048. Untuk mengembangkan daerah

perbatasan perlu sistem buka tutup *border* yang fleksibel, apabila tidak memungkinkan solusinya adalah berfokus pada UMKM yang memiliki korelasi terbesar dengan pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan pendampingan mengenai program KUR, program UMi, dan diversifikasi produk. Selain itu, untuk mengoptimalkan nilai ekspor dapat dilakukan strategi pembayaran dan pembiayaan melalui pengalihan pangsa pasar sehingga meskipun pada Entikong nilai ekspor bernilai 0 dapat dialihkan melalui jalur lain. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat mencerminkan gambaran perekonomian di Entikong dan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan meskipun terdapat beberapa keterbatasan data.

Keywords: Analisis Korelasi, Daerah Perbatasan, Entikong, Indonesia Maju, Perekonomian Daerah Perbatasan, Potensi Daerah Perbatasan

PENDAHULUAN

Daerah perbatasan identik dengan daerah tertinggal, miskin, maupun istilah lain yang berkonotasi negatif. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah secara mutlak benar. Pada kenyataannya, daerah perbatasan merupakan daerah yang potensial karena letak demografinya yang strategis. Dengan adanya daerah perbatasan, aktivitas ekspor-impor dapat lebih mudah dilakukan terkhusus apabila daerah tersebut dapat ditempuh dengan jalur darat. Meskipun sebagai daerah yang potensial, berbagai paradigma juga hadir di sekitarnya baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Penggunaan mata uang yang cenderung lebih bebas, berbagai kasus penyelundupan, imigran gelap, hingga kesulitan dalam pemrosesan administrasi kependudukan karena perkawinan antar negara merupakan beberapa dari sekian banyak paradigma yang ada di daerah perbatasan.

Entikong merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan luas daerah 506,89 km² atau sekitar 3,64% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sanggau. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Tebedu, Serawak, Malaysia, terdapat Pos Batas Negara yang sudah ada sejak 1989 yang dikenal sebagai PLBN Entikong. PLBN Entikong sendiri sudah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya renovasi PLBN yang diresmikan pada tahun 2016. Dengan adanya hal tersebut, tentunya Entikong menjadi sebuah potensi wisata antar negara yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2019 pemerintah juga sudah membangun Pasar Baru Entikong yang diharapkan menjadi pusat perekonomian warga Entikong sekaligus angin segar bagi masyarakat. Pada tahun tersebut tercatat jumlah UMKM di Entikong sebesar 287 UMKM. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2020 dunia dihadapkan dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi membuat *Border* Entikong (akses keluar masuk antar-negara) ditutup, yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Entikong.

Sebelum penutupan *border*, masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat dengan mudah berkunjung ke area PLBN. Bahkan pada masa tersebut terdapat bus antar negara yang semakin memudahkan akses masyarakat kedua negara. Dengan PLBN Entikong sebagai daerah wisata dan kemudahan akses yang ada, perekonomian masyarakat Entikong bergantung pada jumlah wisatawan dan warga negara yang melintas. Penutupan *border* menjadikan Entikong "kota mati" yang tidak terlihat aktivitas perekonomian, bahkan mayoritas toko pada pasar baru Entikong tutup. Hal ini terlihat dari jumlah UMKM pada tahun 2020 turun sebesar 43,21% menjadi 172 pelaku usaha.

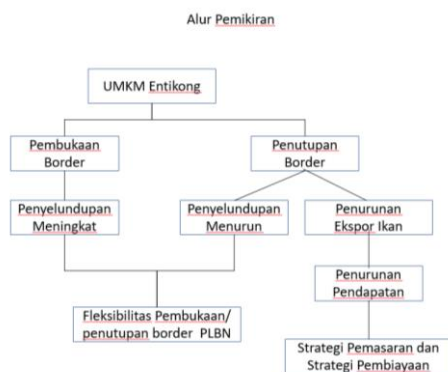
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya masif yang mendukung pemberdayaan UMKM supaya tercipta perekonomian yang merata sebagai salah satu unsur pertumbuhan ekonomi khususnya pada daerah perbatasan yang merupakan potret Bangsa Indonesia bagi negara tetangga. Karena sejatinya daerah

perbatasan merupakan daerah yang potensial.

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran bagaimana penutupan *border* PLBN Entikong memberikan dampak bagi sektor perekonomian pada umumnya dan pelaku UMKM di Entikong pada khususnya dan dapat memberikan rekomendasi terkait dampak perekonomian yang disimpulkan berdasarkan data yang ada. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan juga penulisan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

TINJAUAN LITERATUR

Setelah melihat dan mengkaji keadaan Entikong khususnya selama masa pandemi, penulis melihat ada dampak dari adanya pandemi yang diilustrasikan pada gambar 1.



Gambar 1 Alur Pemikiran Hipotesa

Melihat kondisi perekonomian di Entikong saat ini, mencerminkan bahwa salah satu factor yang memberikan dampak besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat Entikong khususnya sektor UMKM adalah pembukaan dan penutupan *Border* atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) per bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta sektor usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573 triliun atau 61,07%. Selain itu, UMKM juga mampu menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada.

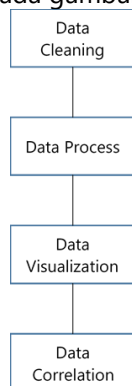
Pembukaan *border* akan mendorong wisatawan untuk datang menuju PLBN sekaligus sebagai akses bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk keluar masuk antar Negara. Dengan adanya wisatawan yang datang, UMKM memiliki pusat perekonomian yang menjadikan entikong lebih hidup. Akan tetapi, di satu sisi juga memberikan dampak yang negatif, yakni kasus penyelundupan akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan dengan kemudahan akses antar negara maka akan semakin mudah pula bagi oknum untuk melakukan atau mencari celah untuk penyelundupan.

Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah memutuskan untuk melakukan penutupan *border* PLBN Entikong yang berdampak berhentinya roda perekonomian. Roda ekonomi yang berhenti menjadikan Entikong layaknya kota mati karena turunnya salah satu unsur perekonomian yakni konsumen. Selain itu, penutupan *border* juga akan berdampak terhadap turunnya ekspor karena tidak adanya akses untuk keluar masuk barang. Nilai ekspor yang turun tentunya akan berpengaruh pada turunnya pendapatan yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, di satu sisi yang lain penutupan *border* memberikan dampak positif yaitu penurunan angka kasus penyelundupan. Untuk itu diperlukan suatu langkah yang strategis atau suatu ide kreatif agar kegiatan perekonomian tetap berjalan dan menekan angka kasus penyelundupan dengan tetap memperhatikan regulasi antar kedua negara dan situasi kondisi yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang diambil adalah data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari satuan kerja KPPN Sanggau dan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Data yang digunakan adalah data *historical* atau *time series* dengan periode waktu 3 tahun dari tahun 2019-2021. Data kuantitatif diantaranya meliputi nilai pertumbuhan ekonomi, jumlah UMKM di Kabupaten Sanggau, Jumlah kasus penyelundupan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong dan Polres Sanggau, serta nilai ekspor dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan (BKIPM) Entikong. Untuk metodologi penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, sesuai yang ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2 *Framework* Metodologi Penelitian

Ketika semua data yang sudah ada terkumpul, tahapan pertama yang dilakukan adalah *data cleaning*. Pada tahapan ini, data yang ada akan dilakukan pembersihan data agar data siap digunakan. Pembersihan data dilakukan untuk menghapus komponen-komponen yang tidak diperlukan, seperti nilai ganda, data *null*, maupun data kosong. Kemudian, *data cleaning* juga dilakukan dengan menyamakan format untuk kemudahan melakukan pengujian hipotesa.

Setelah proses *data cleaning* selesai, akan dilakukan pemrosesan data dengan menggabungkan berbagai komponen dalam data agar sesuai dengan format atau tampilan data yang diinginkan. Ketika sajian data sudah sesuai dengan yang diinginkan, akan dilakukan visualisasi data ke dalam bentuk diagram/histogram agar lebih mudah untuk dipahami dan dianalisa untuk menemukan suatu hubungan sebab akibat yang akan menguji kebenaran hipotesa yang ada.

Dalam data correlation teknik analisis data yang akan digunakan adalah Analisis Korelasi. Menurut DQLab analisis korelasi adalah suatu metodologi analisis data kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel sehingga dapat memudahkan dalam menentukan dan memprediksi variabel lain. Dalam korelasinya tiap data yang ada akan dilihat apakah memiliki hubungan atau tidak. Setelah ditemukan korelasi, akan dilakukan kesimpulan terhadap hipotesa yang ada dan digunakan sebagai acuan dalam pemecahan masalah terhadap hipotesa, apabila hipotesa yang ada terbukti.

Untuk menentukan tingkat korelasi antar variable digunakan rumus kolerasi:

$$\frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2) - (\sum X)^2)((n \sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana,

n : Banyaknya Pasangan data X dan Y

$\sum X$: Total Jumlah dari Variabel X

$\sum Y$: Total Jumlah dari Variabel Y

$\sum X^2$: Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X

$\sum Y^2$: Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y

$\sum XY$: Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y

Dengan, nilai acuan korelasi:

0,00 : Tidak berkorelasi

0,01 – 0,199 : Hubungan korelasi sangat lemah

0,20 – 0,399 : Hubungan korelasi lemah

0,40 – 0,599 : Hubungan korelasi sedang

0,60 – 0,799 : Hubungan korelasi kuat

0,80 – 0,999 : Hubungan korelasi sangat kuat

1 : Korelasi sempurna

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan yang sudah dilakukan, data yang telah dihimpun kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram. Visualisasi data dilakukan untuk melihat tren pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 seperti yang ditunjukkan pada diagram 1, 2, 3, dan 4.

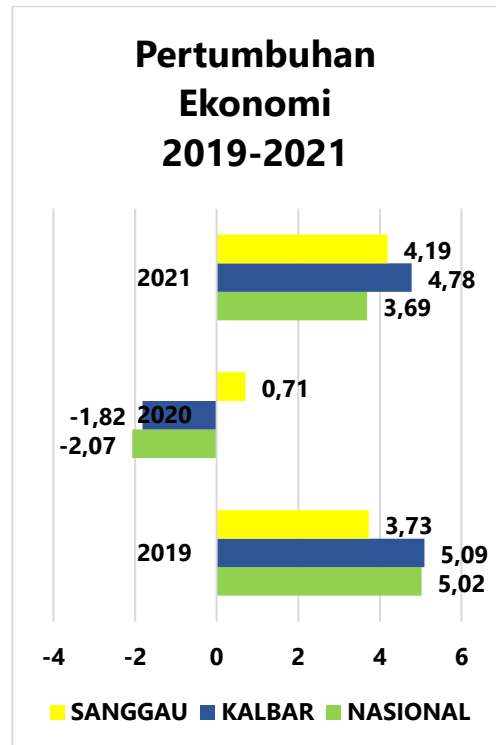


Diagram 1
Pertumbuhan Ekonomi 2019—2021

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2019 berada pada angka 4,19%, kemudian mengalami penurunan menjadi -2,07% pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Perekonomian nasional mulai membaik pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69%.

Pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun berada di atas angka pertumbuhan nasional. Pada tahun 2019, angka pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,09%, kemudian turun menjadi -1,82% pada tahun 2020, dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 4,78%.

Pada Kabupaten Sanggau, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2019 masih berada di bawah angka

pertumbuhan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,73%. Pada Tahun 2020, angka pertumbuhan ekonomi turun menjadi 0,71%. Namun, angka tersebut berada jauh di atas angka pertumbuhan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau naik kembali menjadi 4,19%. Angka tersebut berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional tetapi masih berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

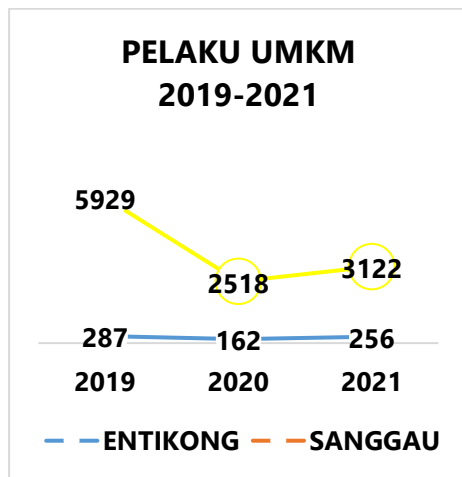


Diagram 2
Pelaku UMKM 2019—2021

Diagram di atas menunjukkan jumlah pelaku UMKM tahun 2019—2021 pada Kecamatan Entikong dan Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Entikong adalah sebesar 287 dari 5929 atau sekitar 4,84% dari jumlah keseluruhan UMKM. Tahun 2020 jumlah UMKM mengalami penurunan menjadi 162 dari 2518 atau sebesar 6,43% dari keseluruhan jumlah UMKM. Tahun 2021, jumlah UMKM mulai merangkak naik menjadi 256 dari 3122 atau sebesar 8,20% dari keseluruhan jumlah UMKM.

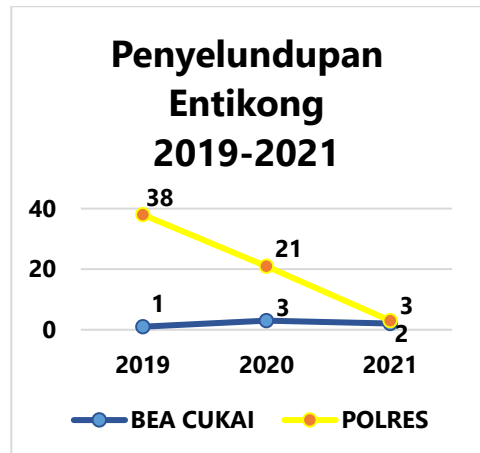


Diagram 3
Kasus Penyelundupan di Entikong Tahun 2019-2021

Pada tahun 2019 terdapat 39 kasus, dimana 1 kasus dilimpahkan ke KPPBC Entikong dan 38 kasus ke Polres Sanggau. Kemudian, pada tahun 2020 terdapat 24 kasus, 3 kasus dilimpahkan ke KPPBC Entikong dan 21 kasus ke Polres Sanggau. Pada tahun 2021 jumlah kasus penyelundupan menurun secara drastis dengan hanya terdapat 5 kasus, yang mana 2 kasus dilimpahkan ke KPPBC Entikong dan 3 kasus ke Polres Sanggau.



Diagram 4
Data Ekspor BKIPM (dalam Kg)

Pada tahun 2019 ekspor yang dilakukan menurut data BKIPM adalah ekspor ikan dengan total 1.258.461 kg. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada ekspor yang dilakukan karena adanya penutupan *border* PLBN Entikong. Untuk ekspor udang sejak tahun 2019 hingga 2021 tidak ada angka ekspor.

Dari 4 data pokok yang ada yakni pertumbuhan ekonomi, jumlah UMKM, kasus penyelundupan di Entikong, dan data ekspor dilakukan analisis korelasi untuk melihat kesinambungan antara keempat indikator yang ada dengan regulasi pembukaan dan penutupan *border* PLBN Entikong. Analisis korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antara:

1. Jumlah UMKM dengan Jumlah Ekspor di Entikong
2. Jumlah Kasus Penyelundupan dengan Jumlah Ekspor di Entikong
3. Jumlah UMKM dengan Jumlah Kasus Penyelundupan di Entikong
4. Jumlah UMKM di Entikong dan Pertumbuhan Ekonomi Sanggau

Untuk keempat korelasi, digambarkan dengan nilai korelasi sesuai dengan metodologi penelitian yang telah dijabarkan dan indikator nilai yang telah ditentukan.

Pertama, untuk korelasi jumlah UMKM dengan jumlah Ekspor di Entikong dijabarkan dalam diagram 5.

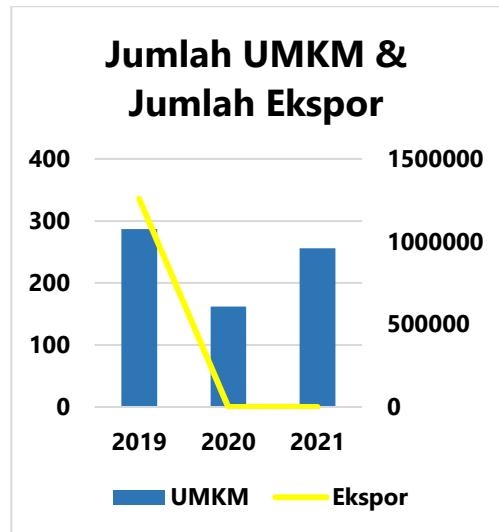


Diagram 5
Jumlah UMKM dan Jumlah Ekspor

Berdasarkan perhitungan korelasi yang dilakukan, nilai korelasi XY untuk 2 variabel tersebut adalah 0,691839. Apabila dilihat dari rentang indikator, korelasi antara kedua variabel tersebut tergolong korelasi kuat namun masih berada pada batas bawah interval kategori korelasi tersebut. Hal ini disebabkan karena meskipun UMKM mengalami kenaikan tidak serta merta ekspor juga akan naik karena pada tahun 2020 dan 2021 jumlah UMKM mengalami kenaikan tetapi nilai ekspor tetap 0 dikarenakan adanya penutupan *border* PLBN Entikong. Sasaran penjualan UMKM sendiri adalah masyarakat sekitar, wisatawan, maupun pelintas antar negara, sedangkan untuk bisa melakukan ekspor satu-satunya cara yang dilakukan yaitu melalui *border*. Ketika dilakukan penutupan *border* nilai ekspor akan turun bahkan menjadi 0. Untuk UMKM masih ada masyarakat sekitar, meskipun akan mengalami penurunan pendapatan atau omset.

Korelasi selanjutnya terkait paradigma pembukaan dan penutupan *border* adalah dengan melihat keterkaitan antara jumlah kasus penyelundupan dan jumlah ekspor di Entikong yang ditunjukkan melalui diagram 6.

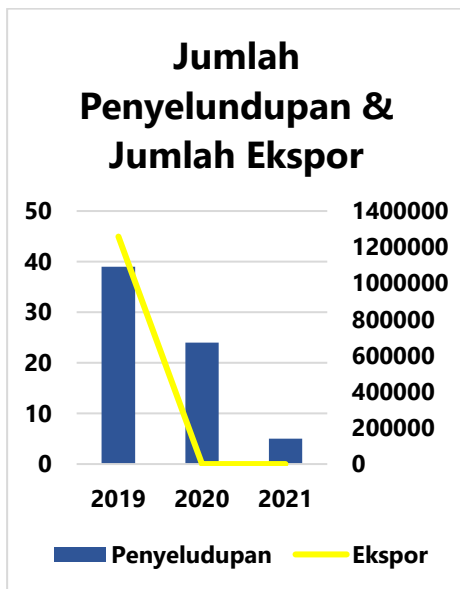


Diagram 6
Jumlah Penyelundupan dan Jumlah Ekspor

Berdasarkan perhitungan korelasi yang dilakukan, nilai korelasi XY untuk 2 variabel tersebut adalah 0,830151. Apabila dilihat dari rentang indikator, korelasi antara kedua variabel tersebut tergolong korelasi sangat kuat. Hal ini disebabkan karena salah satu faktor keduanya ada pada pembukaan dan penutupan *border*. Ketika *border* dibuka, probabilitas untuk melakukan aktivitas ekspor menjadi lebih tinggi, yang kemudian akan memunculkan risiko penyelundupan yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan salah satu hukum ekonomi yakni "*high risk, high return*". Dari hukum tersebut akan memunculkan *trade off* antara keduanya yang memerlukan langkah preventif dari pemerintah untuk mengoptimalkan nilai

ekspor dengan tetap mengelola manajemen risiko atas kasus penyelundupan.

Korelasi berikutnya adalah dengan melihat keterkaitan antara jumlah UMKM dan jumlah kasus penyelundupan di Entikong yang ditunjukkan melalui diagram 7.

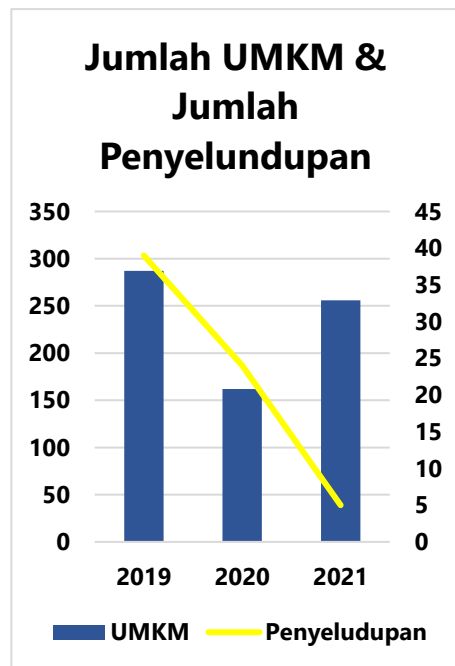


Diagram 7
Jumlah UMKM dan Jumlah Kasus Penyelundupan

Berdasarkan perhitungan korelasi yang dilakukan, nilai korelasi XY untuk 2 variabel tersebut adalah 0,171758. Jika dilihat dari rentang indikator, korelasi antara kedua variabel tersebut tergolong korelasi sangat lemah dengan interval batas bawah yang menunjukkan hampir tidak ada korelasi sama sekali. Hal ini disebabkan karena jumlah UMKM dan jumlah penyelundupan memiliki faktor yang berbeda. Jumlah UMKM bisa dikontrol dan dikelola untuk memberikan stimulus UMKM, baik dari

lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah. Adapun kasus penyelundupan berasal dari faktor eksternal yang tidak diprediksi sehingga langkah strategisnya adalah melakukan tindakan preventif untuk meminimalisasi angka penyelundupan. Tetapi bukan berarti tidak ada korelasi sama sekali, karena keduanya memiliki faktor yang sama yaitu pembukaan dan penutupan *border*.

Korelasi yang terakhir adalah dengan melihat keterkaitan antara Jumlah UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi yang ditunjukkan melalui diagram 8.

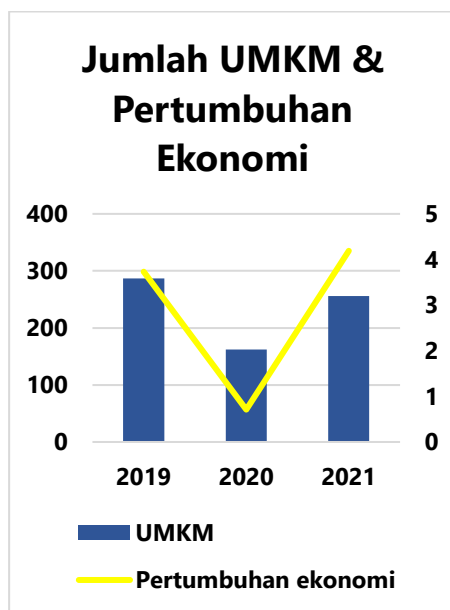


Diagram 8 Jumlah UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan korelasi yang dilakukan, nilai korelasi XY untuk 2 variabel tersebut adalah 0,935048. Apabila dilihat dari rentang indikator, korelasi antara kedua variabel tersebut tergolong korelasi sangat kuat dengan interval batas atas yang menunjukkan kedua variabel tersebut memiliki

korelasi hampir sempurna atau mendekati 1. Hal ini sesuai dengan yang sudah dijabarkan pada telaah literatur, dijelaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573 triliun atau 61,07%. Seiringan dengan hal tersebut, UMKM menjadi salah satu faktor penyokong dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga jika UMKM mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Begitu pun sebaliknya, jika ekonomi mengalami penurunan karena kondisi tertentu, maka sektor UMKM juga akan ikut terdampak.

Dilihat dari hasil analisis yang telah dilakukan, keempat faktor memiliki keterkaitan yang kompleks antara satu dengan yang lain, sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang dapat mendukung setiap indikator tanpa ada ketimpangan. Antar indikator dihubungkan oleh satu faktor yang sama yaitu pembukaan dan penutupan *border*. Oleh karena itu, melihat berbagai kemungkinan terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19 apabila memungkinkan perlu adanya fleksibilitas kebijakan terkait pembukaan atau penutupan *border* PLBN Entikong. Misalnya hanya dengan pembukaan arus keluar masuk barang, angka ekspor dapat dioptimalkan dan UMKM dapat berjalan dengan tetap melakukan pengelolaan risiko untuk kasus penyelundupan.

Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta menjadi solusi utama karena pengambilan keputusan pembukaan atau penutupan *border* perlu dilakukan melalui kesepakatan antara dua negara untuk menerapkan kebijakan tersebut. Maka dari itu, solusi lain yang penulis

tawarkan adalah berfokus pada potensi yang bisa digali di daerah perbatasan khususnya Entikong. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan, korelasi paling kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan adalah UMKM. Untuk mendukung sektor UMKM bisa dilakukan dengan pendampingan KUR dan Program UMi. Dengan adanya pendampingan, diharapkan pelaku usaha menjadi paham dan tahu akan adanya program tersebut sehingga, memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, dapat juga dilakukan pendampingan berupa diversifikasi produk, jadi produk yang dijual adalah bahan mentah tetapi produk olahan yang akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dengan berfokus pada sektor terkecil dan terbesar di Indonesia, maka akan sangat memungkinkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, jika dilihat pada tahun 2019 ke 2020 dan 2021 terdapat penurunan ekspor yang sangat drastis sampai ke angka 0. Dari hal tersebut untuk tetap bisa menggali potensi ekspor di Entikong perlu dilakukan adanya strategi pemasaran dan strategi pembiayaan supaya nilai ekspor tetap maksimal. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengalihan pangsa pasar, sehingga meskipun ekspor di Entikong 0 tetapi ekspor yang ada disalurkan melalui daerah atau cara yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, telah menjawab hipotesa yang ada. Dengan

adanya penutupan *border* pada PLBN Entikong memberikan dampak bagi UMKM, jumlah nilai ekspor, dan jumlah kasus penyelundupan. Jumlah UMKM mengalami penurunan pada tahun 2020 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, dan mulai ikut merangkak naik ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Penutupan *border* juga terbukti memberikan penurunan kasus penyelundupan, karena akses untuk keluar masuk antar negara menjadi terbatas sehingga, penyelundupan berkurang. Akan tetapi, juga memberikan dampak penurunan ekspor menjadi 0.

Berdasarkan analisis korelasi, setiap komponen memiliki salah satu faktor yang mempengaruhi indikator yaitu penutupan atau pembukaan *border* PLBN Entikong. Oleh karena itu, melihat berbagai kemungkinan terutama dalam kondisi Pandemi Covid-19 apabila memungkinkan perlu adanya fleksibilitas kebijakan terkait pembukaan atau penutupan *border* PLBN Entikong. Misalnya, hanya dengan arus keluar masuk barang sehingga angka ekspor dapat dioptimalkan, UMKM dapat berjalan, dan dengan tetap melakukan pengelolaan risiko untuk kasus penyelundupan.

Akan tetapi, apabila tidak dimungkinkan dapat dilakukan dengan fokus pada sektor UMKM karena, UMKM memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan langkah masif untuk mendorong perekonomian di daerah perbatasan Entikong. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara

memberikan pendampingan kepada pelaku usaha terkait program KUR, program Pembiayaan UMi, dan diversifikasi produk. Dengan adanya pendampingan usaha diharapkan pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi salah satu indikator dalam pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, jika dilihat pada tahun 2019 ke 2020 dan 2021 terdapat penurunan ekspor yang sangat drastis sampai ke angka 0. Dari hal tersebut untuk tetap bisa menggali potensi ekspor di Entikong perlu dilakukan adanya strategi pemasaran dan strategi pembiayaan supaya nilai ekspor tetap maksimal. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengalihan pangsa pasar, sehingga meskipun ekspor di Entikong 0 tetapi, ekspor yang ada disalurkan melalui daerah/cara yang lain.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan gambaran bagaimana kondisi perekonomian di daerah perbatasan Entikong dan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses pengambilan keputusan untuk. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data UMKM pada tahun 2019 memiliki ketidakakuratan pada omset UMKM karena masih dilakukan secara manual, sehingga tidak bisa diberikan gambaran bagaimana potensi pendapatan dari sektor UMKM. Selain itu, data yang ada masih terbatas pada satu wilayah saja yakni Entikong, sehingga data yang ada

dimungkinkan untuk memiliki perbedaan data pada daerah perbatasan lainnya. Kedepan bisa dilakukan penelitian lebih lanjut terkait menggali potensi pada daerah perbatasan dengan data yang lebih relevan dan komprehensif sehingga bisa mencerminkan kondisi daerah perbatasan secara keseluruhan.

REFERENSI

1. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong. (2019—2021). Data Ekspor Ikan dan Udang Gala.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2022). Kabupaten Sanggau Dalam Angka.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2022). Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. (2019—2021). Data UMKM.
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. (2019—2021). Data Kasus Penyelundupan.
6. Polres Sanggau. (2019—2021). Data Kasus Penyelundupan